

**POLA KEMITRAAN DALAM PENGOPTIMALAN KONSEP  
ECOTOURISM UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA  
KARIMUNJAWA DI KABUPATEN JEPARA**

**Ummi Hani**

**Email : [ummihani211@gmail.com](mailto:ummihani211@gmail.com)**

**Dra. Puji Astuti, M.Si**

**Email : [pujiundip@gmail.com](mailto:pujiundip@gmail.com)**

**Departemen Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Laman : <https://fisip.undip.com/> - Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai pola kemitraan dalam pengoptimalan konsep *ecotourism* untuk pengembangan pariwisata di Karimunjawa. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Jepara melakukan kemitraan/kerja sama dengan pihak lain seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan masyarakat lokal.

Penelitian ini menggunakan teori kemitraan dan konsep *ecotourism*, dimana dalam teori kemitraan terdapat indikator yang harus dipenuhi seperti tidak ada dominasi dari salah satu pihak, keterbukaan dan tidak ada pihak yang dirugikan atau dengan kata lain dapat saling menguntungkan. Selain itu dalam konsep *ecotourism* sendiri memiliki ciri bahwa dalam implementasinya, penyelenggaraan pariwisata harus memerhatikan keberlangsungan lingkungan dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pelaku wisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan dalam pengoptimalan konsep *ecotourism* untuk pengembangan pariwisata Karimunjawa melibatkan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan masyarakat lokal Karimunjawa sudah berjalan dengan baik, dengan pola kemitraan mutualistik, yaitu adanya persekutuan dua pihak atau lebih yang saling menyadari akan aspek pentingnya melakukan kemitraan di Karimunjawa dengan prinsip kesetaraan dan tidak saling mendominasi untuk dapat saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dengan mudah mencapai tujuan secara lebih optimal. Namun dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala seperti kurangnya koordinasi antar pihak (pemerintah, masyarakat), maupun kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemilahan sampah rumah tangga.

**Kata kunci : Kemitraan, Pariwisata, Ekowisata**

**PARTNERSHIP PATTERN IN OPTIMIZING ECOTOURISM CONCEPT FOR  
KARIMUNJAWA TOURISM DEVELOPMENT IN JEPARA REGENCY**

**Umami Hani**

**Email : [ummihani211@gmail.com](mailto:ummihani211@gmail.com)**

**Dra. Puji Astuti, M.Si**

**Email : [pujiundip@gmail.com](mailto:pujiundip@gmail.com)**

**Departemen Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Laman : <https://fisip.undip.com/> - Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

**ABSTRACT**

*This study discusses the pattern of partnerships in optimizing the concept of ecotourism for tourism development in Karimunjawa. In this case, the Jepara Regency Tourism and Culture Office, which is responsible for the implementation of tourism in Jepara Regency, has partnerships/collaborations with other parties such as the Jepara Regency Environmental Service and local communities.*

*This study uses partnership theory and the concept of ecotourism, where in partnership theory there are indicators that must be met such as no domination from one party, openness and no party is harmed or in other words can be mutually beneficial. In addition, the concept of ecotourism itself has the characteristic that in its implementation, the implementation of tourism must pay attention to environmental sustainability and involve the community as part of tourism actors. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques carried out through interviews, observation, and documentation.*

*The results of this study indicate that the partnership pattern in optimizing the ecotourism concept for tourism development in Karimunjawa involves cooperation between the Tourism and Culture Office of Jepara Regency with the Jepara Regency Environmental Service and the local community of Karimunjawa has been going well, with a mutualistic partnership pattern, namely the existence of an alliance of two parties or more people who are mutually aware of the important aspects of partnering in Karimunjawa with the principle of equality and not dominating each other to be able to provide mutual benefits and get more benefits, so that they will easily achieve their goals more optimally. However, in its implementation, of course there are obstacles such as lack of coordination between parties (government, community), as well as lack of public understanding of household waste sorting.*

**Keywords: Partnership, Tourism, Ecotourism**

## A. PENDAHULUAN

Kemitraan menjadi salah satu bukti bahwa seseorang maupun organisasi tidak dapat melakukan segalanya sendiri, perlu adanya bantuan dari pihak lain untuk dapat membantu menyelesaikan suatu *problem* maupun mencapai tujuan yang diharapkan. Istilah kemitraan seringkali disamakan dengan istilah lainnya seperti kolaborasi, kerja sama, maupun aliansi. Istilah ini sebenarnya sebagai suatu perwujudan dari dilakukannya kerja sama dan partisipasi aktif baik antar individu, kelompok maupun lembaga untuk dapat saling membantu, saling menguntungkan, dan bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam praktiknya kemitraan juga dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terbatas pada pemerintahan pusat saja, namun juga dalam lingkup pemerintahan daerah.

Dewasa ini, perkembangan sektor pariwisata mulai melirik pada potensi masyarakat lokal hal ini sejalan dengan empat elemen pengembangan kepariwisataan yaitu pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan

kelembagaan. Dimana dalam elemen kelembagaan ini termasuk pula pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, serta peningkatan kerja sama dalam upaya meningkatkan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Kepulauan Karimunjawa yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu tujuan wisata dengan mengusung pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan wisata berbasis lingkungan dan budaya lokal sejalan dengan konsep *ecotourism* yang menunjang dalam aktivitas pariwisata, rekreasi, budaya maupun penelitian dan budidaya, atau pada prinsipnya memuat aspek ekologis, ekonomis, dan sosial budaya. Hal ini juga sejalan dengan Visi pembangunan pariwisata Kabupaten Jepara yaitu “Terwujudnya Kabupaten Jepara sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Maju dan Bertumpu pada Potensi Budaya Lokal Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat.”

Dalam upaya mendongkrak daya tarik pariwisata maupun dalam upaya melindungi ekosistem laut diperlukan adanya pengembangan lebih lanjut, tidak

berfokus hanya pada peran aktif dari pemerintah saja namun juga perlu dilakukan kemitraan antara pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pengembangan promosi pariwisata, penyedia fasilitas, maupun penjaga keseimbangan ekosistem di Karimunjawa. Permasalahan dalam pengelolaan Karimunjawa selama ini adalah terbatasnya koordinasi dan kerja sama antar pihak sehingga perlu adanya keterlibatan *stakeholder* untuk menjadi mitra dalam pengelolaannya. Tingginya peningkatan pemanfaatan sumber daya Karimunjawa tentu dapat mengancam kualitas sumber daya dan jika terus menerus dibiarkan cepat atau lambat tentu akan mengancam sektor pariwisata alam unggulannya. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya melibatkan satu aspek saja (misalnya hanya tugas pemerintah semata) tidak semata-mata hanya tergantung pada satu peran *stakeholder*, namun adanya keterkaitan dan kerja sama masyarakat dari berbagai kelompok juga menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengembangan pariwisata. Kemitraan dapat menjadi suatu strategi dalam usaha mengembangkan pariwisata di suatu wilayah serta mendorong adanya produktifitas masyarakat. Karena itu, sudah selayaknya

*stakeholder* pariwisata mengimplementasikan kemitraan baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi program kerja bidang pengelolaan destinasi pariwisata. Ini berarti bahwa peran dari berbagai *stakeholder* dalam pariwisata memiliki kontribusi yang besar dalam mendorong pengembangan pariwisata terutama dengan konsep *ecotourism* yang mendukung adanya pariwisata yang berkelanjutan.

Adanya latar belakang tersebut membuat penulis memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengoptimalan konsep *ecotourism* untuk pengembangan pariwisata Karimunjawa di Kabupaten Jepara.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengoptimalan konsep *ecotourism* untuk pengembangan pariwisata Karimunjawa di Kabupaten Jepara.

## C. KERANGKA PEMIKIRANTEORITIS

### 1. Kemitraan

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama dari berbagai pihak, yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama. Kemitraan menyiratkan adanya upaya bersama dan sukarela menuju tujuan bersama. Dalam konteks tata kelola yang baik, kemitraan merupakan hal yang sangat penting dan membutuhkan partisipasi bersama dari para pemangku kepentingan, yang berarti bahwa warga negara yang memiliki andil dalam proses tata kelola (Mardiyanta, 2011: 15).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa kemitraan merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan menggunakan prinsip (*win-win solution*) dimana masing-masing pihak yang bermitra saling memperoleh keuntungan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Pihak atau aktor yang melakukan kemitraan dapat meliputi berbagai sektor seperti individu, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga non-

pemerintah. Pihak-pihak inilah yang bekerja sama untuk memperoleh tujuan bersama berdasarkan pada prinsip, kesepakatan, dan peran masing-masing.

Adapun pola kemitraan menurut Sulistiyani (2004:130-131) dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kemitraan Semu *Pseudo partnership*

Kemitraan semu merupakan persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun sesungguhnya tidak melakukan kerja sama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerja sama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

#### 2. Kemitraan Mutualistik

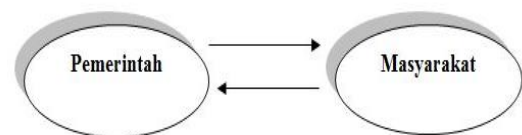
Kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang saling menyadari akan aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk dapat saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga

akan dengan mudah mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan sebuah kerja sama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerja sama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing pihak dalam mewujudkan visi dan tujuannya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

### 3. Kemitraan Konjugasi

Kemitraan Konjugasi merupakan sebuah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok maupun perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Dalam suatu pola kemitraan terjadi adanya interaksi antar pihak/aktor yang mana dalam prosesnya dapat terjalin karena masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda. Perbedaan antar aktor baik peran pemerintah, swasta dan masyarakat menjadikan satu sama lain saling membutuhkan dan saling melengkapi.



**Gambar Pola Kemitraan**

Dari gambar pola kemitraan di atas dapat diketahui bahwa sebuah Interaksi karena masing-masing pihak/aktor memiliki peran yang berbeda-beda, namun saling membutuhkan satu sama lain dan dapat saling melengkapi. Dalam hal ini terjadi kolaborasi peran dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai kepentingan dan tujuan seperti dalam penelitian yang akan dilakukan pada pola kemitraan dalam upaya pengembangan pariwisata. Menurut Kuswidanti (2008) terdapat tiga kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing pihak bermitra yaitu:

- a. Prinsip Kesetaraan (*Equity*), dalam hal ini pihak-pihak yang bermitra baik pemerintah, masyarakat, dan swasta yang telah bersedia menjalin kemitraan harus memiliki kedudukan yang sejajar tanpa adanya dominasi pihak lain.
- b. Prinsip Keterbukaan, setiap pihak harus terbuka dan jujur terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara para mitra.
- c. Saling menguntungkan, dalam hal ini setiap pihak yang bermitra dalam melaksanakan pengembangan pariwisata mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama dari kemitraan tersebut.

### 1. Ekowisata/*Ecotourism*

Ekowisata/ *Ecotourism* merupakan kegiatan pariwisata yang bertanggung jawab secara lingkungan dan alam, memberikan kontribusi yang positif terhadap konservasi lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. *Ecotourism* merupakan salah satu aspek yang sangat

terkait dengan lingkungan, perkembangan diharapkan mampu melestarikan sumber daya alam dan lingkungan (Suksma, 2009). Prinsip-prinsip *ecotourism/ekowisata* menurut Wood dalam Ferdinal (2017) yaitu sebagai berikut.

- a. Meminimalkan dampak negatif terhadap alam dan budaya setempat.
- b. Mendidik wisatawan pentingnya konservasi.
- c. Menekankan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan setempat dan memberikan manfaat konservasi.
- d. Menekankan perlunya zonasi pariwisata regional dan rencana pengelolaan pengunjung untuk salah satu daerah atau kawasan alam yang dijadwalkan untuk menjadi tujuan *ecotourism /ekowisata*
- e. Memaksimalkan manfaat ekonomi, bisnis dan masyarakat setempat yang tinggal di daerah sekitar.
- f. Memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak melebihi batas sosial dan lingkungan yang dapat

diterima yang ditentukan para peneliti dengan penduduk setempat.

- g. Bergantung pada infrastruktur yang dikembangkan selaras dengan lingkungan, meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil, melestarikan tanaman lokal dan satwa liar, dan pencampuran dengan lingkungan alam dan budaya.

Pada dasarnya konsep *ecotourism*/ ekowisata terkait dengan tiga hal: yaitu ekologis, ekonomis, dan sosial budaya masyarakat.(tambahan)

## **A. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa maupun kejadian dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan juga studi dokumentasi.

## **E. HASIL PENELITIAN**

### **1. Kemitraan antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dengan Masyarakat Lokal dalam**

## **Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal Karimunjawa**

Dalam pengembangan pariwisata yang menggunakan konsep *ecotourism* penting untuk melibatkan partisipasi masyarakat lokal serta keterlibatan dari pemerintah sebagai penyelenggara tata kelola pemerintahan. Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan pemerintahan dan membuat suatu kebijakan maupun program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini salah satu pihak yang memiliki kewenangan dalam upaya pengelolaan pariwisata di Kepulauan Karimunjawa adalah Pemerintah daerah yang dibantu oleh organisasi perangkat daerah lainnya terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Kawasan Taman Nasional Karimunjawa dalam pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat di Karimunjawa dan sekitarnya, dan pemerataan



pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun keterlibatan dari pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Karimunjawa yaitu bersifat koordinasi, peran pemerintah dalam upaya pengembangan pariwisata di Karimunjawa cukup kompleks, terlebih dengan ditetapkannya pariwisata Karimunjawa sebagai kawasan pariwisata andalan yang memerhatikan kelestarian, keberlangsungan lingkungan serta mendorong pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat lokal, tentu saja tidak dapat dijalankan oleh satu instansi atau organisasi perangkat daerah, namun harus melibatkan beberapa *stakeholder* terkait yang dapat meningkatkan efektifitas dan daya guna dalam pengembangan pariwisata Karimunjawa.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam pengembangan kawasan pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki andil untuk pengembangan kawasan pariwisata di Karimunjawa dengan menyelenggarakan berbagai program yang dilakukan untuk menarik kunjungan wisatawan, melakukan promosi pariwisata melalui berbagai media, bahkan terdapat pusat informasi

mengenai pariwisata di Jepara dan terkhusus pula di Karimunjawa, yaitu TIC (*Tourism Information Center*) Kabupaten Jepara.

Hal ini tentu sejalan dengan visi yang menjadi acuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Jepara sebagai daerah tujuan wisata yang maju dengan bertumpu pada potensi budaya lokal melalui peningkatan kualitas sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat”. Dengan misi yang diemban yaitu: a.) Menyiapkan dan meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata; b) Meningkatkan infrastruktur pendukung sarana dan prasarana; c) Mengembangkan daya tarik wisata; d) Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat, termasuk dunia usaha dalam pengembangan pariwisata. Inilah yang mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam upaya melakukan pengembangan kawasan pariwisata, khususnya di Karimunjawa dengan melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat lokal Karimunjawa untuk berkerjasama membangun pariwisata yang berkelanjutan, bertumpu pada potensi lokal dengan konsep *ecotourism*.

Sesuai dengan hal tersebut, maka dalam Rencana Program, Kegiatan Perangkat Daerah Disparbud Tahun 2019-2022 terdapat beberapa program kegiatan diantara sebagai berikut:

**Tabel Rencana Program, Kegiatan Perangkat Daerah Disparbud Tahun 2019-2022**

No.	Program dan Kegiatan
1.	Fasilitasi Pengembangan Lintas Budaya di Karimunjawa
2.	Event Sail Indonesia
3.	Operasional Sarana Prasarana dan Obyek Wisata di Karimunjawa
4.	Pengembangan Sarana Prasarana di Karimunjawa
5.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Wisata dan Kelompok Sadar Wisata
6.	Pelatihan Peningkatan Berbahasa Asing ( <i>Guide</i> )
7.	Pembuatan Sarana dan Prasarana Promosi
8.	Pembuatan dan penggandaan CD profil Karimunjawa
9.	Pameran dan Promosi Pariwisata
10.	Pembinaan Seni dan Pengembangan Seni Budaya di Jepara

Sumber: Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Jepara tahun 2017-2022

Hambatan terjadi karena adanya pandemi Covid-19, terjadi perubahan program kegiatan maupun anggaran, banyak program kegiatan yang dialihkan menjadi kegiatan virtual, namun hal tersebut, dapat teratasi dengan baik melalui penyesuaian target dan pengaturan jadwal kegiatan yang dilakukan.

Mengetahui perlunya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan suatu kawasan pariwisata, maka tugas pemerintah selaku pembuat kebijakan dan penyelenggara tata kelola pemerintah adalah memberikan kebijakan maupun program yang sesuai dengan sasaran pengembangan pariwisata yang diharapkan. Sudah dijelaskan di atas, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara terbagi menjadi tiga divisi yang saling bekerjasama untuk membangun Karimunjawa, baik dari segi pengembangan daya tarik objek wisata, sarana dan prasarana, serta infrastruktur di Karimunjawa pada khususnya dan Kabupaten Jepara pada umumnya, dalam hal pengembangan pariwisata di Karimunjawa Divisi Destinasi Pariwisata melaksanakan beberapa hal, diantaranya adalah:

## **a. Pembangunan Objek Wisata Karimunjawa**

Dalam keberjalanan pariwisata di Karimunjawa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara memiliki tiga lahan/kawasan utama yang dikembangkan di Karimunjawa, tiga lahan/kawasan tersebut yaitu Bukit Jati Kerep, Rumah Adat Kemojan, dan Wisma Wisata Karimunjawa. Ketiga lahan inilah yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara di Kawasan Karimunjawa, sehingga dalam pengembangannya kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; 1) Bukit Jati Kerep merupakan salah satu kawasan objek wisata yang dimiliki dan dikelola secara langsung oleh Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, dimana untuk masuk Bukit ini tidak ada biaya retribusi, akses menuju objek wisata Bukit Jati Kerep bisa dilalui dengan kendaraan roda dua maupun roda empat, namun sayang, di beberapa titik masih ditemui jalan yang kondisinya belum diperbaiki, karena untuk perbaikan akses jalan/ infrastruktur merupakan kewenangan dari Dinas Pekerjaan

Umum. 2) Rumah Adat Kemojan merupakan kawasan yang dikelola oleh pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara) dimana rumah adat kemojan merupakan bentuk rumah panggung asli dari Suku Bugis, keberadaan rumah adat ini sekarang sudah semakin sedikit, dari yang mencapai jumlah 100 sekarang hanya tinggal 20-an rumah, masyarakat sudah cenderung beralih membangun rumah dengan gaya moderen menggunakan semen, karena dianggap lebih tahan lama. Maka dari itu, perlu dilakukannya perhatian lebih dari pemerintah untuk dapat menjaga keberadaan Rumah Adat Kemojan agar tidak punah. Selain untuk menjaga agar tidak punah, pemerintah juga berupaya mempertahankan dan melestarikan Rumah Adat Kemojan dijadikan sebagai destinasi wisata dengan kearifan lokal. 3) Wisma Wisata Karimunjawa merupakan sebuah wisma yang dibangun oleh pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara) sebagai penginapan umum dengan tarif penginapan yang tidak terlalu mahal. Dalam upaya pembangunan ketiga kawasan tersebut tentu saja perlu dukungan dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lain

untuk meningkatkan kualitas pariwisata Karimunjawa.

Dalam upaya pembangunan kawasan wisata ini, pemerintah mengalami kendala terkait dengan kepemilikan lahan/tanah oleh warga/masyarakat lokal yang belum dikelola dengan baik, banyak lahan kosong yang dimiliki warga sengaja tidak dikelola karena diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi yang lebih menguntungkan. Utamanya dijual kepada pihak swasta, namun belum dikelola dan hanya menjadi lahan kosong yang belum memiliki nilai ekonomis pariwisata.

#### **b. Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Pelaku Wisata**

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal di Karimunjawa sebagai pendukung dalam pengembangan pariwisata yang berbasis *ecotourism*, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara melakukan kerjasama dengan masyarakat dengan mengadakan beberapa program untuk pengembangan skill/keterampilan bagi pelaku wisata di

Karimunjawa. Pelatihan yang dilakukan bagi pelaku wisata ini menunjang kegiatan/ aktivitas pariwisata yang ada di Karimunjawa, seperti pelatihan skill/keterampilan menjadi *tour guide*/pramuwisata, pelatihan untuk pemilik homestay seperti penataan ruangan, pelatihan skill Bahasa Inggris, *in house training (public speaking)*, sertifikasi selam, sertifikasi snorkeling, maupun pengenalan ekosistem bawah laut, dalam pengenalan ekosistem bawah laut ini perlu dipelajari oleh *tour guide*, maupun penyelam agar dalam mendampingi aktivitas pariwisata utamanya bagi para wisatawan tidak menimbulkan resiko kerusakan pada karang atau ekosistem bawah laut. Hal ini tentu dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal yang mendukung kegiatan pariwisata di Karimunjawa.

Pemerintah Kabupaten Jepara menyadari bahwa untuk mencapai sasaran pengembangan kepariwisataan di Karimunjawa sebagai tujuan wisata bahari, mutlak dibutuhkan peran serta masyarakat khususnya masyarakat lokal di sekitar wilayah obyek wisata karena masyarakat di sekitar merupakan motor penggerak hidupnya suatu obyek wisata,

dukungan tersebut dapat berupa partisipasi menjaga keamanan, keindahan, kebersihan, kelestarian, maupun sebagai pelaku wisata penyedia pelayanan jasa wisata. Kemitraan di Dinas Pariwisata juga turut menggandeng para biro perjalanan pariwisata di Kabupaten Jepara, seperti contoh paguyuban pelaku biro pariwisata Karimunjawa (Trans Karimunjawa Perkumpulan Biro Wisata Karimunjawa/PBWK), pelaku biro Pariwisata Kabupaten Jepara, HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) DPC Karimunjawa.

Di pariwisata Karimunjawa terdapat beberapa paguyuban/ kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pariwisata, salah satunya adalah HPI Karimunjawa, yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia Karimunjawa, keberadaan pramuwisata atau yang kita kenal dengan “*tour guide*” dalam kegiatan pariwisata merupakan hal yang sangat penting, terlebih pramuwisata di kawasan wisata yang dikelilingi dengan area konservasi. Sejalan dengan visi HPI yaitu “Terwujudnya organisasi pramuwisata yang berdaya saing global, berbasis anggota, memupuk motivasi semangat rasa memiliki serta rasa kesetiakawanan antar anggota demi tercapainya tujuan

bersama, sehingga mampu mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.” Ini sesuai dengan misi poin 4 dan 5 dari HPI Karimunjawa, yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia HPI Karimunjawa.” Dan “Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan Karimunjawa”. HPI Karimunjawa memiliki 285 anggota yang tersebar di seluruh Kecamatan Karimunjawa, dan anggota diprioritaskan masyarakat lokal Karimunjawa. Beberapa kegiatan/program yang dilakukan oleh HPI dan tentunya didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut:

**Program sertifikasi dan Pelatihan  
SDM Himpunan Pramuwisata  
Indonesia Karimunjawa**

<b>Sertifikasi Selam</b>	<b>Sertifikasi SKKNI lainnya</b>	<b>Pelatihan lainnya</b>
<i>Open Water</i>	Sertifikasi Ekowisata	Pelatihan <i>Public Speaking</i>
<i>Advance</i>	Sertifikasi Konservasi	Pelatihan Bahasa Inggris
<i>Resque</i>		
<i>Dive Master</i>		
Instruktur Selam		

Sumber: Himpunan Pramuwisata Indonesia Karimunjawa

Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah merupakan suatu upaya dalam pemberdayaan masyarakat lokal serta penyuluhan terkait dengan bagaimana menjalankan perekonomian di sektor pariwisata dengan konsep *ecotourism*, yaitu dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk membangun kesejahteraan bersama bagi masyarakat Karimunjawa.

Dengan adanya dukungan ketersediaan sumber daya manusia lokal yang cukup dan memadai untuk mendukung pengelolaan kawasan wisata Karimunjawa menjadi hal yang penting dan mendasar karena pengembangan kawasan wisata dimaksudkan untuk dapat memberdayakan potensi sumber daya manusia setempat sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan produktifitasnya secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan melalui bidang-bidang yang dimilikinya.

Selain itu, dalam pengembangan kawasan pariwisata Karimunjawa dengan konsep *ecotourism* yang melakukan pemberdayaan bagi masyarakat dan

berupaya menjaga ekosistem lingkungan, tentu saja melibatkan masyarakat lokal Karimunjawa untuk aktif dalam kegiatan di sektor pariwisata. Ini juga terkait dengan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Karimunjawa. Di Kepulauan Karimunjawa sendiri memiliki 6 (enam) suku yang mendiami, suku-suku tersebut ialah Suku Jawa, Bugis, Madura, Bajo, Buton, dan Mandar, dimana setiap suku ini memiliki kebiasaan, adat maupun tradisi yang mewakili setiap suku yang mendiami Karimunjawa. Inilah yang menjadi tugas dari Divisi Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara yang bertugas untuk memfasilitasi pengembangan kebudayaan keenam suku yang ada di Karimunjawa sebagai langkah untuk pelestarian dan penunjang daya tarik pariwisata. Beberapa kesenian khas yang biasanya ditampilkan oleh masyarakat Karimunjawa sebagai daya tarik pariwisata diantaranya seperti Tari Minagara dari Suku Jawa, Pencak Baruga dari Suku Mandar, Tari Tonduk Majeng dari Suku Madura, dan Tari Lulo dari Suku Buton. Kebanyakan suku ini berasal dari pesisir dengan kebiasaan masyarakat pesisir yang kental. Selain kesenian khas dari enam suku tersebut, terdapat pula *event* besar yang diadakan masyarakat lokal Karimunjawa

secara keseluruhan yaitu “Festival Barikan Kubro Karimunjawa” dimana seluruh masyarakat di Kepulauan Karimunjawa saling bekerjasama dalam melaksanakan atau menguri-uri acara ini, festival ini dikemas secara apik dengan mengangkat tradisi, budaya, dan kesenian lokal Karimunjawa. Festival akbar barikan kubro Karimunjawa ini juga melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah setempat, masyarakat Karimunjawa, dan komunitas/kelompok seni. Acara ini juga dapat menarik minat pariwisata. Namun, berbagai kesenian, pertunjukan, maupun festival budaya yang ada di Karimunjawa terhenti semenjak adanya Covid-19. Tidak ada pertunjukan yang dilakukan untuk sarana hiburan wisatawan, dan banyak paguyuban dan kelompok seni yang merasakan dampak dari pandemi Covid-19.

Dalam pengembangan kepariwisataan di Karimunjawa tentu saja tidak bisa meninggalkan adanya promosi, promosi merupakan hal yang sangat vital dalam menggaet minat pariwisata seseorang, calon wisatawan akan tertarik dan mencari informasi lebih lanjut terkait dengan kegiatan pariwisata yang ditawarkan. Promosi yang dilakukan juga tidak hanya mengenai daya tarik alam saja, namun mempromosikan objek-objek wisata, seni

budaya, dan kehidupan budaya masyarakat dalam rangka menunjang pariwisata. Hal inilah yang menjadi tugas Divisi Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, dimana dalam tugasnya Divisi Pemasaran melakukan beberapa upaya yaitu terkait dengan pengelolaan promosi dan penyuluhan pariwisata, pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata, branding pariwisata dan penetapan tagline pariwisata khususnya Karimunjawa. Promosi digital yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara melalui Divisi Pemasaran yaitu dengan membentuk *Tourism Information Center* (TIC) Kabupaten Jepara yang memiliki web/laman resmi yang berisi informasi mengenai beragam kegiatan pariwisata, mulai dari informasi daftar objek pariwisata, hotel/penginapan, *travel tour*, makanan khas dan lain-lain. Selain promosi melalui web/laman resmi TIC, sudah banyak juga media sosial, seperti youtube yang digunakan sebagai ajang promosi pariwisata Karimunjawa, sehingga calon wisatawan akan mudah mengakses informasi yang dapat diakses di beberapa media digital. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara juga melakukan promosi melalui pembuatan video pariwisata

Karimunjawa yang dicetak menjadi CD profil. Promosi khusus pariwisata Karimunjawa juga terkait dengan beberapa *event/* acara besar dengan pecinta atau komunitas tertentu yang diselenggarakan tiap tahunnya seperti Barikan Kubro, tradisi Lomban Karimunjawa, *Event sail, Goes Karimunjawa*. Acara ini tentu saja membutuhkan promosi yang masif, karena tentu akan menarik minat pariwisata, namun sejauh ini, promosi pariwisata Kabupaten Jepara, khususnya Karimunjawa masih belum begitu maksimal, informasi lebih banyak didapatkan dari biro perjalanan pariwisata, dan kebanyakan orang belum begitu mengetahui keberadaan web/laman pariwisata dari pemerintah.

## **2. Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan Masyarakat Bidang Kelestarian Lingkungan di Karimunjawa**

Keterlibatan pemerintah dalam hal pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi atau organisasi perangkat daerah saja, namun terdapat pula kerjasama yang dilakukan oleh instansi atau organisasi perangkat daerah lain dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga dapat tercipta tujuan yang diharapkan secara lebih

optimal. Inilah yang dimaksud dengan kemitraan antar organisasi pemerintah atau yang dikenal dengan istilah *public-public partnership*, dimana kemitraan atau kerjasama ini dilakukan oleh dua organisasi pemerintah atau lebih untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seperti adanya peran atau keterlibatan dari beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Jepara yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Selain keterlibatan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara sebagai penanggungjawab dan pengelola pariwisata di Kabupaten Jepara, tentunya dalam pengembangan kawasan pariwisata Karimunjawa yang memerhatikan konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan konsep *ecotourism*, terdapat pula peran dari instansi atau organisasi perangkat daerah lainnya, yang tentunya sudah difokuskan pada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini sesuai dengan prinsip *public-public partnership* yaitu upaya kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi pemerintah atau lebih



untuk mewujudkan tujuan bersama, peningkatan kapasitas dan efektifitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara juga menjadi pokok penting dalam upaya pengembangan suatu sektor pariwisata dengan memperhatikan konsep *ecotourism*. Tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara adalah upaya dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan menjaganya dari kerusakan alam, terutama agar tidak terdampak pada kegiatan pariwisata yang ada di Karimunjawa, terlebih lagi Karimunjawa merupakan suatu kepulauan yang tidak memiliki *landfill* (tempat pembuangan sampah), dimana tidak terdapat daerah pembuangan sampah yang cukup besar menampung sampah yang dihasilkan tiap harinya, baik sampah dari aktivitas rumah tangga maupun dari kegiatan pariwisata, sehingga masyarakat Karimunjawa cenderung membuang sampah dengan menghanyutkan ke laut dan dibakar.

Produksi sampah tersebut dinilai akan menjadi permasalahan yang besar

jika tidak diantisipasi sejak awal. Persoalan ini tentu saja perlu diantisipasi, saat ini memang belum terlihat dampaknya, namun jika tidak diantisipasi sejak awal, tentu saja permasalahan sampah ini akan menimbulkan persoalan besar seperti dampak bagi keberlangsungan pariwisata hingga dampak kerusakan ekologis yang akan merugikan masyarakat Karimunjawa bahkan Kabupaten Jepara secara umum. Latar belakang dijadikannya Karimunjawa sebagai desa mandiri sampah karena Karimunjawa merupakan suatu destinasi pariwisata nasional, sehingga seluruh upaya pembangunan harus memerhatikan aspek ekologis termasuk citra bersih dari sampah. Hal ini juga sejalan dengan Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara yaitu “Memperkuat Sumber Daya Alam yang Seimbang dengan Kesejahteraan Rakyat” dengan cara peningkatan kualitas konservasi sumber daya alam dan lingkungan dengan menyediakan sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan yang dapat bernilai

ekonomis. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Jepara melakukan upaya untuk mengatasi sampah dengan cara kerjasama dan memberdayakan masyarakat lokal melalui desa mandiri sampah Karimunjawa.

**a. Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) Karimunjawa**

Untuk dapat memantapkan kualitas pariwisata di Karimunjawa, maka Dinas Lingkungan Hidup Jepara bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan Edukasi Pembatasan dan Pengurangan Plastik Sekali Pakai *Eco Living* di Kecamatan Karimunjawa. Pengelolaan sampah yang ada di Karimunjawa harus dilakukan dengan benar-benar menerapkan pola pemanfaatan, yaitu dengan cara melakukan program daur ulang yang berkesinambungan. Salah satunya yaitu dengan menyiapkan bangunan pusat daur ulang (PDU). Fasilitas ini dibangun usai Pemerintah Kabupaten Jepara mendapatkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mengingat pula sampah hasil aktivitas rumah tangga masyarakat Karimunjawa yang cukup banyak, seperti yang dapat diketahui dari tabel berikut:

**Banyaknya RT, RW, dan Rumah Tangga di Kecamatan Karimunjawa Tahun 2019**

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga
1.	Karimunjawa	1.502
2.	Kemujaan	764
3.	Parang	453
4.	Nyamuk	226
<b>Jumlah</b>		2.945

*Sumber: Kecamatan Karimunjawa dalam Angka 2020*

Dari Tabel tersebut diketahui bahwa jumlah rumah tangga di Karimunjawa memang tidak begitu besar bila dibandingkan dengan kawasan yang berada di luar Karimunjawa, namun karena Karimunjawa merupakan daerah kepulauan yang tidak memiliki tempat pembuangan sampah maka hal itu akan menjadi suatu masalah, terlebih Karimunjawa merupakan kawasan wisata yang berbasis pada konservasi alam. Selain itu, seperti yang diketahui bahwa jumlah pengunjung/ wisatawan yang melakukan kunjungan wisata di Kabupaten Jepara cukup tinggi terutama wisata bahari.

Pusat Daur Ulang (PDU) Karimunjawa yang resmi beroperasi pada Agustus 2020 ini memiliki

kapasitas pengolahan sampah 10 ton perhari terutama dari sampah aktivitas domestik rumah tangga dan sampah aktivitas pariwisata. Pusat Daur Ulang (PDU) Karimunjawa dapat memilah sampah berdasarkan dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Untuk sampah organik akan digiling dan dijadikan pupuk, dan sampah anorganik dapat diolah sehingga memiliki nilai ekonomis. PDU Karimunjawa dilengkapi dengan dua unit motor pengangkut sampah, tiga buah mesin pemilah, satu buah mesin pengumpan, satu buah mesin pengolah pupuk organik, dua unit mesin pengayak kompos, dua buah mesin pencetak butiran pupuk organik, dan satu unit mesin untuk fermentasi. Yang mana pupuk yang dihasilkan dari Pusat Daur Ulang (PDU) tersebut nantinya akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat Karimunjawa maupun pada kelompok peduli lingkungan atau pegiat konservasi lingkungan yang ada di Karimunjawa. Hal ini juga turut membantu dalam pelestarian tumbuhan di Karimunjawa dan mencegah dari adanya penggunaan pupuk yang berbahan kimia sehingga ramah lingkungan.

Dalam Pusat Daur Ulang (PDU) Karimunjawa, sampah yang terolah akan masuk dalam skema program desa mandiri sampah. Adanya fasilitas daur ulang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dari bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini tidak hanya akan menyelesaikan permasalahan sampah, namun juga dapat memberdayakan masyarakat dalam beberapa aspek pengelolaan, yaitu kelembagaan, pembiayaan yang akuntabel dan kemandirian, teknis teknologis dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, adanya PDU membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, terlebih Karimunjawa adalah salah satu pariwisata unggulan dengan konsep *ecotourism*, juga mampu menjadi destinasi wisata yang ramah lingkungan. Pembangunan ekosistem pengelolaan sampah untuk kemandirian dalam rangka pemberdayaan masyarakat, keberlangsungan lingkungan dan circular ekonomi dengan program tata kelola sampah pola 3RB (*reduce, reuse, recycle, benefit*) sampah sebagai sumber daya sirkular ekonomi dengan memanfaatkan kerjasama antar

masyarakat untuk dapat mengolah sampah di Karimunjawa sesuai dengan prinsip 3RB (*reduce, reuse, recycle, benefit*). Namun penerapan prinsip tersebut masih kurang maksimal.

Sementara itu, hambatan yang dialami dalam pengelolaan Pusat Daur Ulang (PDU) yaitu masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Pusat Daur Ulang (PDU) Karimunjawa, dikarenakan masyarakat di Karimunjawa masih ada belum dapat memilah antara sampah organik dan anorganik, terkadang masih terdapat pula masyarakat yang mencampur sampah yang mereka hasilkan dari sampah rumah tangga, sehingga terjadi kesulitan pemilahan oleh petugas Pusat Daur Ulang (PDU). Dalam implementasi program ini juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip 3RB (*reduce, reuse, recycle, benefit*), karena masih kurang masifnya sosialisasi terhadap masyarakat. Berikut merupakan penampakan PDU Karimunjawa



Sumber: Dokumentasi pribadi

Sementara ini Pusat Daur Ulang (PDU) Karimunjawa mengambil sampah yang memiliki nilai ekonomis, seperti sampah botol plastik, alumunium, dan lain sebagainya, namun untuk pupuk kompos pengolahannya masih belum maksimal, karena dari masyarakat sendiri terkadang masih belum ada pemilahan, karena pada mesin pemilah sampah tidak bisa segala jenis sampah dimasukkan.

Sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, yang akhirnya berdampak pada segala sektor aspek kehidupan termasuk pula pariwisata, yaitu dengan adanya penurunan tingkat kunjungan wisatawan pada objek wisata, hal ini sejalan dengan menurunnya tingkat produksi sampah di Karimunjawa, yaitu turun sekitar 50%. Hal ini disebabkan karena tidak ada pengunjung yang melakukan aktivitas kepariwisataan di Karimunjawa, sehingga tidak menghasilkan sampah seperti biasanya. Kebanyakan sampah berasal dari laut yang terbawa oleh ombak dan sampah rumah tangga saja. Maka untuk pengelolaan sampah di Karimunjawa pada saat Covid-19 lebih terfokus pada sampah laut dan bersih pantai.

Upaya pengembangan pariwisata Karimunjawa harus mampu

mengakomodir dua hal penting, yaitu kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Yang mana hal tersebut dapat terwujud melalui konsep pariwisata *ecotourism*. Oleh karenanya pembangunan pariwisata Karimunjawa harus memiliki manfaat besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Orientasi pengembangan harus memiliki keseimbangan kepentingan antara ekonomi dan konservasi dan seluruh rangkaian proses dari pengembangan sampai dengan pembangunan tentu saja harus melibatkan pemerintah, masyarakat maupun *stakeholder* terkait.

## **F. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan dalam pengoptimalan konsep *ecotourism* untuk pengembangan pariwisata Karimunjawa penting melibatkan kerjasama antar *stakeholder*/ pihak. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara sebagai organisasi perangkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Jepara tidak dapat melakukan pengoptimalan konsep

*ecotourism* pariwisata Karimunjawa sendiri, namun melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan Masyarakat lokal, agar tujuan dari konsep pariwisata *ecotourism* dapat dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar dapat meningkatkan efektifitas dan daya guna dalam pengembangan pariwisata Karimunjawa.

Dalam hal ini, upaya pengoptimalan konsep *ecotourism* di Karimunjawa sudah cukup baik, jika dilihat dari aspek *ecotourism* yaitu aspek ekonomis, ekologis, dan sosial budaya sudah berjalan dengan baik. Dari segi ekonomis, masyarakat Karimunjawa memanfaatkan sektor kepariwisataan sebagai penyedia jasa wisata, kebutuhan penginapan, tempat makan, oleh-oleh khas Karimunjawa dan lainnya. Hal ini juga ditandai dengan munculnya kelompok/paguyuban terkait dengan penyedia jasa pariwisata, seperti HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) Karimunjawa, Perkumpulan Biro Wisata Karimunjawa dan lainnya. Selanjutnya yaitu aspek ekologis, dapat diketahui bahwa Karimunjawa merupakan daerah yang menerapkan pembagian zona,

terdapat sembilan pembagian zona di Karimunjawa yang diperuntukkan untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Terdapat pula aspek sosial dan budaya, Karimunjawa memiliki penduduk dengan beragam suku dengan budaya, kebiasaan dan adat istiadat masing-masing, seperti adanya rumah panggung khas Suku Bugis, munculnya sanggar/keompok tari dari beragam suku, dimana keberagaman tersebut dijadikan sebagai salah satu keunggulan pariwisata budaya yang ada di Karimunjawa.

Adapun keterlibatan dari pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Karimunjawa yaitu bersifat koordinasi. Dalam mendukung pariwisata berbasis *ecotourism* di Karimunjawa, Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara sebagai pemilik kewenangan dan tanggung jawab dalam urusan kepariwisataan dilakukan beberapa program/kegiatan, seperti pembangunan kawasan objek wisata Karimunjawa, pelestarian kebudayaan suku yang mendiami Karimunjawa dan pengadaan pelatihan keterampilan/skill terkait dengan kepariwisataan kepada

masyarakat lokal dan pelaku wisata, kerja sama juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara yaitu dengan adanya program desa mandiri sampah yang diwujudkan dengan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah (PDU) Karimunjawa. Dimana dalam prinsip *ecotourism*, maka dalam pelaksanaannya dilakukan pula kerja sama dengan masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat lokal.

Kemitraan dalam pengoptimalan konsep *ecotourism* untuk pengembangan pariwisata di Karimunjawa tersebut memiliki pola kemitraan mutualistik, yaitu adanya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang saling menyadari akan aspek pentingnya melakukan kemitraan di Karimunjawa dengan prinsip kesetaraan dan tidak saling mendominasi untuk dapat saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dengan mudah mencapai tujuan secara lebih optimal. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja hal ini mengalami beberapa tantangan/ kendala. Seperti kendala yang dialami berupa kurangnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah dan masyarakat, keterbatasan lahan yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara di Karimunjawa, adanya tanggung jawab yang tumpang tindih antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dengan BTNKJ (Balai Taman Nasional Karimunjawa) serta masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan limbah sampah yang ada di Karimunjawa sehingga terdapat kesulitan dalam pengelolaan sampah oleh PDU (Pusat Daur Ulang) Karimunjawa. Selain itu, sejak munculnya pandemi Covid-19 terdapat pergeseran anggaran dan program yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga program kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

#### **4.2. Saran**

Terkait dengan adanya kendala/kelemahan yang terjadi dalam upaya pengoptimalan konsep *ecotourism* untuk pengembangan pariwisata Karimunjawa maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu dalam pola kemitraan tentunya diperlukan kerjasama yang kuat dan seimbang. Terkait dengan kemitraan karimunjawa diharapkan pemerintah dapat menguatkan kembali hubungan antara pemda dalam hal ini organisasi

perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara sebagai pemegang tugas dan tanggung jawab dalam urusan kepariwisataan dengan masyarakat serta meningkatkan koordinasi agar terjadi komunikasi yang baik antar kedua belah pihak, selain itu perlu adanya perhatian lebih Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara terkait dengan promosi infotmasi pariwisata yang diharapkan dapat lebih masif lagi.

Terkait dalam pengelolaan sampah di Karimunjawa yaitu PDU (Pusat Daur Ulang) Karimunjawa di bawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan masyarakat Karimunjawa terkait dengan pemilahan sampah dan sosialisasi ekonomis/nilai guna pemanfaatan sampah yang ada di Karimunjawa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat Karimunjawa mengenai pengelolaan sampah, misalnya dengan mendaur ulang sampah serta memilah sampah yang bisa diolah dan sampah yang tidak bisa diolah kembali, sehingga pengetahuan masyarakat mengenai

pengelolaan sampah bisa teratasi dengan baik sehingga dapat menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan tentunya memiliki manfaat ekonomis bagi masyarakat. Selain itu, pada pandemi Covid-19 dan musim ombak seperti ini, PDU (Pusat Daur Ulang) Karimunjawa diharapkan agar dapat fokus pada sampah laut dan dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk kegiatan (*clean up coastal*) bersih pantai.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A Muri, Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Asmin, Ferdinal. 2017. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana*.
- Avenzora, Ricky. 2018. *Pembangunan Ekowisata pada Kawasan Hutan Produksi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Hlm. 61-73.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. Hlm: 180-181.
- Ibrahim, Johannes. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 26.
- Ibrahim, Nana Sujana. 1989. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, hlm.64.
- Marfai, Muh. Aris, dkk. 2021. *Kajian Pengelolaan Pesisir Berbasis Ekowisata di Kepulauan Karimunjawa*. Yogyakarta: UGM PRESS. Hlm: 5.
- Miles dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Bersumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta : UIP. Hlm 15-19.
- Moleong, Lexy j. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Hlm 6.
- Rosmaladewi, Okke. 2018. *Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan*

*Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm: 11.

Suryabrata, Sumardi, 1987, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali. Hlm 19.

Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo. Hlm 9.

### Jurnal dan penelitian:

- Andini, Laras Ayu. 2014. *Pola Kemitraan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi*. Vol 3 No.4.
- Darwis, dan Junaid, Ilham. 2016. *Kemitraan Sebagai Strategi pengembangan Pariwisata dan Industri Hospitaliti*. Jurnal Kepariwisata. Vol.10. No 1. Hal 01-13.
- Hapsari, Frita Aprilia. 2017. *Pola Kemitraan Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Dan Kelompok Prenjak Dalam Pengelolaan Eco Edukasi Wisata Desa Tapak Kota Semarang Tahun 2016*. Vol 6 No. 2.
- Madyaningrum, Ika Ristiyani, dkk. 2019. *Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Taman Nasional Karimunjawa*. Jurnal Studi Pembanguna Interdisiplin. Vol. 28, No. 2. Hal 140-148.
- Maghfiroh, Artika Nanda. 2020. *Strategi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa*. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. Vol. 12. No. 2. Hlm: 367-381.
- Mardiyanta, Antun. 2011. *Kebijakan Publik Deliberatif*. Vol. 24, No.3. Hal 15.
- Melyanti, Imelda Merry. 2014. *Pola Kemitraan, Pemerintah, Civil*

- Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 2, No 1.*
- Muniah. 2016. *Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Karimunjawa. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian. Vol. 10, No. 1. Hal 69-83.*
- Nugroho, Sonny Setyo. 2015. *Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Pariwisata di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara. Vol 4 No. 1.*
- Priyanto, Sabda Elisa. 2016. *Dampak Perkembangan Pariwisata Minat Khusus Snorkeling Terhadap Lingkungan: Kasus Destinasi Karimunjawa. Jurnal Kepariwisata. Vol 10, No.3. hal 13-28.*
- Riadi, Septa, dkk. 2021. *Penyuluhan Urgensi Sumberdaya Pesisir dan Lautan di Pulau Kemujan Taman Nasional Karimunjawa. Jurnal Abdi Masyarakat Sabural. Vol. 2, No. 1. Hal 9-17.*
- Kuswidanti. 2008. *Gambaran Kemitraan Ilmu Sektor dan Organisasi di Bidang Kesehatan dalam Upaya Penanganan Flu Burung di Bidang Komunikasi Komite Nasional Flu Burung dan Pandemi Influenza (Komnas FBPI). Skripsi Jurusan Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Depok.*
- Saputra, Rizki Bagus. 2016. *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pulau Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah. Jurnal Hukum. Vol. 5, No. 4.*
- Dokumen:**
- RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Jepara tahun 2025.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tahun 2019.
- RKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara tahun 2019.
- Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara tahun 2017-2022.
- Perundangan:**
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- Keputusan Menteri Kehutanan No.78/Kpts-II/1999 tentang penetapan Karimunjawa sebagai Taman Nasional menjadi Taman Nasional Karimunjawa.
- Situs/Website:**
- <https://jeparakab.bps.go.id/publication/2019/09/26/b14474a33878f321d58279a0/kecamatan-karimunjawa-dalam-angka-2019.html>  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. 2019. *Kecamatan Karimunjawa dalam Angka, 2019*. Diakses tanggal 18 November 2020, pukul 15.20 WIB
- <https://dlh.jepara.go.id/2020/10/27/mewujudkandesamandiri-sampah-di-karimunjawa/>  
Mewujudkan Desa Mandiri Sampah di Karimunjawa. Diakses pada 23 Oktober 2022, Pukul 19.15 WIB
- <https://maritim.go.id/kembangkan-wisata-karimun-jawa-pemerintah-siapkan-infrastruktur-pendukung/>  
Kembangkan Wisata Karimunjawa, Pemerintah siapkan Infrastruktur Pendukung Diakses pada 17 Oktober 2022, Pukul 20.05 WIB

<https://www.jeparahariini.com/pemerintah-resmikan-pdu-di-karimunjawa/>

Pemerintah Resmikan PDU Sampah di Karimunjawa. Diakses pada 23 Oktober 2022, Pukul 19.23 WIB